

## Novel Baswedan dkk Bakal Gabung Kortas Tipikor Polri, Ini Respon KPK

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons soal pelantikan 44 eks pegawai sebagai aparat sipil negara (ASN) di Polri. Mantan pegawai KPK yang akhirnya dilantik antara lain eks Kasatgas Penyidik Novel Baswedan, eks Kasatgas Penyelidik Harun Al Rasyid, dan eks Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo.

Para eks pegawai KPK ini disebut-sebut bakal ditempatkan di satuan kerja khusus pemberantasan tindak pidana korupsi yang dibentuk oleh Polri. Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya akan mendukung setiap lembaga yang memiliki komitmen pemberantasan korupsi.

"Hal ini, sesuai dengan tugas KPK yang diamanatkan undang-undang untuk melakukan koordinasi dan supervisi kepada setiap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik," ujar Ali, melalui keterangan pers, Rabu (15/12).

Menurut Ali, koordinasi yang solid antar-lembaga menjadi kunci sinergi yang ha-

rus terus dibangun oleh kedua lembaga penegak hukum tersebut. Sehingga, seluruh pemangku kepentingan punya visi yang sama untuk memberantas korupsi, dengan saling memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi.

"Agar bisa saling memberikan dukungan dan counterpartner untuk berkontribusi dalam pemberantasan korupsi," ucapnya.

Ali menilai, KPK maupun penegak hukum lain hingga lembaga peradilan tidak bisa bekerja sendiri. Menurut dia, dukungan sekaligus pengawasan publik dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi merupakan keniscayaan.

Misalnya, penindakan tanpa adanya laporan masyarakat, maka sulit untuk memperoleh informasi. Pencegahan tanpa adanya dukungan dan pengawasan masyarakat, maka sulit untuk memperbaiki suatu sistem dan tata kelola secara konsisten.

Selain itu, pendidikan tanpa adanya komitmen masyarakat itu sendiri, maka sulit untuk membangun pribadi yang berintegritas dan berbudaya antikorupsi. ● han

## SOAL RUU PERAMPASAN ASET

### DPR Masih Tunggu Naskah Akademik RUU Perampasan Aset dari Pemerintah

JAKARTA (IM) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuka peluang Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya mengungkapkan, meski Prolegnas Prioritas 2022 telah disepakati, namun RUU Perampasan Aset dapat disisipkan. Dasar hukum penyisipan itu yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP).

"Jika DPR dan pemerintah bersepakat, bisa memasukkan rancangan undang-undang yang dianggap menjadi kebutuhan, itu saja. Jadi modelnya disisipkan saja," kata Willy saat dihubungi, Rabu (15/12).

Pasal 23 Ayat (2) UU PPP mengatur bahwa dalam keadaan tertentu DPR atau presiden dapat mengajukan RUU

di luar Prolegnas. Keadaan tertentu artinya ada urgensi nasional atas suatu RUU yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan pemerintah.

Willy mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait wacana penyisipan RUU Perampasan Aset dalam Prolegnas Prioritas 2022.

"Itu kan kemedesakan ya, prosesnya itu sudah ada cantelan hukumnya, cukup menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011," ujar politisi Partai Nasdem itu.

Willy menambahkan, saat ini DPR dalam posisi menunggu draf RUU Perampasan aset dari pemerintah agar dapat segera dibahas. Ia pun mengaku belum mengetahui materi yang tertuang dalam RUU tersebut sehingga dianggap urgen oleh pemerintah. ● mei

## Partai Buruh Ingin Usung Capres Sendiri, Berharap Presidential Threshold Dihapus

JAKARTA (IM) - Presiden Partai Buruh Said Iqbal berharap pihaknya dapat mencalonkan presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Ditegaskan bahwa Partai Buruh tidak akan jatuh dalam pragmatisme politik yang membuat suatu partai mengusung nama elite sebagai calon presiden.

Sebagai partai yang diklaim berbasis perjuangan kelas, Partai Buruh hendak mengusung capres dari kalangan menengah ke bawah, seperti partai-partai buruh di sejumlah negara saat ini.

"Kami sifatnya konvensional. Andalkan Allah mengizinkan Partai Buruh lolos verifikasi (KPU), langsung kami konvensional. Dua tahun sebelum Pilpres, Partai Buruh akan melakukan konvensi nasional," ujar Said, Selasa (14/12).

"Belum tentu calonnya dari Partai Buruh. Konvensi yang menentukan secara terbuka, objektif, independen," lanjutnya.

Said menyinggung soal keterpilihan Pedro Castillo, seorang aktivis buruh sekaligus guru, dalam pemilihan presiden di Peru pada Juni 2021 lalu. Menurutnya, keterpilihan Castillo menjadi sinyal bahwa

partai berbasis perjuangan kelas dapat bersuara dalam pilpres. "Boleh nama-nama disebut, nama-nama internal Partai Buruh, atau nama-nama orang baik yang selama ini tidak punya partai dan tidak menonjolkan diri. Kami buka seluasnya," ucap Said.

"Kami akan buka penjarangan di daerah. Banyak lho, tokoh di daerah yang baik, walaupun bukan gubernur, mungkin tokoh masyarakat. Kalau perlu, anak muda di bawah 50 tahun, cerdas, baik, track recordnya baik, ya dia yang kami calonkan. Nanti partai bekerja buat dia, bukan dia memberi uang kepada partai," ujarnya.

Namun, untuk meluluskan langkah itu, Said berharap agar ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen dihapus. Ketentuan itu sangat pro terhadap oligarki, karena hanya partai/gabungan partai politik yang menguasai sedikitnya 20 persen kursi di parlemen yang dapat mencalonkan presiden.

"Masih ada dua tahun untuk kita berjuang (menghapus ambang batas pencalonan presiden), kuncinya itu," tutup Said. ● han



**PEMBAGIAN BLT BAGI BURUH ROKOK**  
Buruh rokok menunjukkan uang yang diterimanya saat pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kudus, Jawa Tengah, Rabu (15/12). Sebanyak 63.067 buruh rokok di wilayah itu menerima BLT sebesar Rp300.000 selama dua bulan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

# 2 Polhukam

FOTO:ANT



## PUTUSAN MK TENTANG UU CIPTA KERJA

Hakim anggota Mahkamah Konstitusi (MK) Wahiduddin Adams (kiri) bersama Suhartoyo (kanan) mengikuti sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (15/12). Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

# Pimpinan MPR Sebut Mafia Tanah Kayak Kentut, Tak Terlihat Namun Baunya Terasa

Pimpinan MPR mendukung Polri yang telah membentuk Satuan Tugas Anti-Mafia Tanah yang berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN.

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengalogikan mafia tanah di Indonesia seperti kentut, tidak bisa dilihat tapi baunya bisa dirasakan. Karena itu, dirinya memastikan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pemberantasan mafia tanah dan bertindak tegas terhadap siapa pun yang membekingi mafia tanah.

Menindaklanjuti hal itu, Polri telah membentuk Satuan

Tugas Anti-Mafia Tanah yang berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN.

"Kita patut mendukung upaya yang sedang dilakukan Kapolri tersebut. Hal ini penting agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri akan terus membaik. Namun, masyarakat masih perlu diberi kemudahan untuk melapor," kata Basarah dalam seminar nasional yang diselenggarakan oleh Program Studi Doktor

Hukum dan Program Studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) bekerja sama dengan Sekretariat Jenderal MPR RI, yang bertajuk "Refleksi Akhir Tahun, Memutus Ekosistem dan Episentrum Mafia Tanah" di ruang GBHN, kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/12).

Politikus PDI Perjuangan ini mengingatkan bahwa hal ini jangan seperti ungkapan yang berkembang di masyarakat "lapor kehilangan kambing malah hilang sapinya" lantaran mekanisme pelaporannya, khususnya bagi masyarakat di kawasan desa dan pedalaman.

"Jangan seperti pameo yang berkembang di tengah masyarakat 'lapor kehilangan

kambing malah hilang sapinya'. Metode kemudahan melapor ini penting bukan hanya bagi masyarakat perkotaan namun juga bagi penduduk yang tinggal di desa/pedalaman. Jika mereka berhadapan dengan mafia tanah, jangkakan berharap bisa menang, untuk melapor saja belum tentu mereka punya keberanian untuk melakukannya," ujarnya.

Basarah mengajak seluruh pihak untuk bekerja lebih keras dan cerdas lagi untuk merubah sudut pandang sebagian masyarakat yang sinis terhadap hukum di Indonesia, karena dipersepsikan sering tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

"Kasih Urag Habis Perkera", "Semua Urusan Mesti Uang Tunai" dan banyak lagi satire atau sindiran lainnya.

Basarah menambahkan, data menunjukkan terdapat sekitar 125 pegawai BPN terlibat mafia tanah dan jumlah ini cukup banyak dan baru terungkap.

"Ini jumlah yang baru terungkap. Mafia tanah ini ibarat orang buang angin, wujudnya tidak terlihat namun bisa dirasa aromanya," sindir Basarah.

Sementara itu, pakar Hukum Tanah/Agraria dari UKI, Aartje Tehupeury menekankan, negara harus melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus mafia tanah secara political will. Sebab, pember-

antasannya membutuhkan strategi jitu dengan mengaktifkan semua lembaga terkait, khususnya aparat penegak hukum.

"Kejujuran dan sifat memperjuangkan kebenaran dari semua pejabat-pejabat yang terkait dengan pengurusan masalah tanah juga harus dijunjung tinggi. Karena sebaik apapun sebuah sistem dibangun untuk mengatasi masalah atau konflik pertanian, masalah mafia tanah tidak akan pernah berhenti jika moral pejabat-pejabat yang terkait tidak dijunjung tinggi," kata Aartje.

Kemudian, Ketua Program Studi Doktor Hukum UKI John Pieris mengatakan, persoalan tanah merupakan "kutukan" untuk bangsa Indonesia. "Tanah-tanah adat yang tidak punya sertifikat diambil alih oleh pemerintah Belanda, setelah Indonesia merdeka, pemerintah mengambil tanah itu. Mungkin secara kasar saya katakan 'kutukan historis'," kata John.

John menegaskan bahwa perang terhadap mafia tanah bukan hanya dari segi pikiran, melainkan hingga fisik.

"Demo di seluruh provinsi, karena sudah stadium 6, 7, 8, sudah sistemik. Sudah seperti itu. Perang semesta begitu, saya kira," ucap John. ● han



**WASPADA Omicron, Masyarakat Tak Boleh Abai Protokol Kesehatan**  
Widodo (Jokowi) mewanti-wanti seluruh masyarakat Indonesia agar terus menaungi protokol kesehatan (prokes), mengingat Covid-19 varian Omicron yang diperkirakan sudah menyebar di 70 negara.

## Waspada Omicron, Masyarakat Tak Boleh Abai Protokol Kesehatan

JAKARTA (IM) - Penurunan kasus Covid-19 di Indonesia, hendaklah tak membuat masyarakat menjadi abai terhadap protokol kesehatan (prokes), mengingat Covid-19 varian Omicron yang diperkirakan sudah menyebar di 70 negara.

Sayangnya, banyak di antara masyarakat yang merespons penurunan kasus Covid-19 di Indonesia dengan abai prokes, terutama memakai masker.

Dari pantauan di sekitar Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, tidak sedikit terlihat dari pedagang dan pengunjung tak mengenakan masker, sebagian lagi memakai masker asal-asalan sehingga masker melorot di dagu.

Seorang pedagang mengaku pakai masker membuat mereka justru tidak nyaman dan merasa sesak sehingga masker dikantongi.

"Pakai masker membuat mereka sulit bernafas," ujar salah seorang pedagang pakan ikan di Pasar Jatinegara, saat ditemui pada Selasa (14/12).

Sementara seorang pengunjung mengaku saat ini kondisinya sudah aman. Jadi tak perlu takut lagi walau tidak memakai masker," ujar salah seorang pengunjung yang tak mau disebut namanya.

Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irfan Dedi Prasetyo, mengatakan, Presiden Joko

Widodo (Jokowi) mewanti-wanti seluruh masyarakat Indonesia agar terus menaungi protokol kesehatan (prokes), mengingat Covid-19 varian Omicron yang diperkirakan sudah menyebar di 70 negara.

"Bapak Presiden mengingatkan yang pertama tentang penanganan covid-19, kita harus berhati-hati menghadapi varian terbaru Omicron, kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh abai, meskipun saat ini Indonesia di posisi bisa dikatakan cukup baik dalam hal penanganan covid-19," ujar Irfan Dedi Prasetyo di Bali, Jumat (3/12) lalu.

Menurut Dedi, vira-

Widodo (Jokowi) mewanti-wanti seluruh masyarakat Indonesia agar terus menaungi protokol kesehatan (prokes), mengingat Covid-19 varian Omicron yang diperkirakan sudah menyebar di 70 negara.

## Apapun Variannya, Cegah dengan Tertib Prokes

JAKARTA (IM) - Covid-19 varian Omicron disebut-sebut dua kali lebih menular dari varian asli sudah terdeteksi di lebih dari 70 negara. Kendati demikian masyarakat tidak perlu panik dan merasa takut berlebihan. Sebab dengan tertib melaksanakan protokol kesehatan seseorang dapat terhindar dari paparan virus.

Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru dokter Reisa Broto Asmoro, mengatakan, apa pun jenis varian-nya, benteng pertahanan dalam menghadapinya adalah dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan dan vaksinasi dosis lengkap.

"Apapun varian COVID-19 nya, pencegahannya jangan sampai tertular adalah tertib protokol kesehatan serta lengkapi diri dengan vaksinasi dua dosis. Buat yang belum vaksin tidak perlu pilih-pilih vaksin dan kita yakin kita optimis bisa melewati pandemi ini bersama-sama," kata Reisa dalam Siaran Sehat Bersama Dokter Reisa bertajuk Waspada Varian Omicron, Tetap Jaga Protokol Kesehatan, baru-baru ini.

Menurut Reisa, meskipun vaksin COVID-19 di Indonesia sudah mencapai lebih dari 130 kali kedatangan dan

## Apapun Variannya, Cegah dengan Tertib Prokes

JAKARTA (IM) - Covid-19 varian Omicron disebut-sebut dua kali lebih menular dari varian asli sudah terdeteksi di lebih dari 70 negara. Kendati demikian masyarakat tidak perlu panik dan merasa takut berlebihan. Sebab dengan tertib melaksanakan protokol kesehatan seseorang dapat terhindar dari paparan virus.

Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru dokter Reisa Broto Asmoro, mengatakan, apa pun jenis varian-nya, benteng pertahanan dalam menghadapinya adalah dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan dan vaksinasi dosis lengkap.

"Apapun varian COVID-19 nya, pencegahannya jangan sampai tertular adalah tertib protokol kesehatan serta lengkapi diri dengan vaksinasi dua dosis. Buat yang belum vaksin tidak perlu pilih-pilih vaksin dan kita yakin kita optimis bisa melewati pandemi ini bersama-sama," kata Reisa dalam Siaran Sehat Bersama Dokter Reisa bertajuk Waspada Varian Omicron, Tetap Jaga Protokol Kesehatan, baru-baru ini.

Menurut Reisa, meskipun vaksin COVID-19 di Indonesia sudah mencapai lebih dari 130 kali kedatangan dan

didistribusikan dalam jumlah banyak, ternyata masih banyak masyarakat yang termasuk dalam kelompok rentan belum tercapai.

Kelompok tersebut meliputi penduduk lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan untuk bisa mengikuti kegiatan vaksinasi. Cakupan vaksinasi pada kelompok itu masih dikatakan rendah.

"Terutama lansia, kaum disabilitas ini butuh bantuan kita untuk bisa melakukan vaksinasi karena cakupannya masih rendah. Jadi pemerintah punya jalannya, dengan distribusi vaksin dan pengadaan vaksinnya banyak sekali jumlahnya," kata Reisa.

Namun dalam hal ini dibutuhkan kerja sama dari semua pihak, untuk membantu kelompok tersebut mendapatkan vaksin COVID-19 yang akan mempercepat terciptanya kekebalan kelompok. Diharapkan seluruh masyarakat Indonesia turut mengambil andil dalam hal ini. Masyarakat dapat membantu dengan mendaftarkan anggota keluarga yang belum divaksin, diantarkan ke fasilitas kesehatan terdekat hingga memberikan pemahaman betapa pentingnya vaksinasi untuk menangkal Covid-19. ● mar

**PT FAJAR BERKAT ABADI Berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan")**

**PEMBERITAHUAN**

Bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT FAJAR BERKAT ABADI, tertanggal 01 Desember 2021, para pemegang saham Perseroan antara lain telah setuju untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan cara mengkonversi utang Perseroan kepada:

1. Tuan ANDRE WIJAYA GUNAWAN berdasarkan Perjanjian Konversi Surat Hutang tertanggal 01 Desember 2021, sebesar Rp.1.154.000.000,- menjadi setoran modal dalam Perseroan.

Demikianlah pemberitahuan ini dibuat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1999 tanggal 25 Februari 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham.

Jakarta, 16 Desember 2021  
Direksi  
PT FAJAR BERKAT ABADI

**PENGUMUMAN**

Dengan akta tgl 9-12-2021 no. 6, dibuat di hadapan MUHAMMAD NAHI MUNGKAR, SH., Notaris di Jakarta Barat, telah dibubarkan PT. GRAMAR SAMUDRA NUSANTARA, berkedudukan di Jakarta Barat, dengan Likuidator DANIEL SUFIAH THALIE.

Tagihan Kreditur supaya disampaikan secara tertulis kepada Likuidator, dengan alamat: Komplek Daan Mogot Prima, Jalan Pulo Nangka II Blok A 3/9, RT.009 RW.002, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat 11740, dan sudah harus diterima oleh Likuidator paling lambat 60 hari sejak tanggal pengumuman ini.

**OTORITAS ASURANSI KESEHATAN**

**PEMBERITAHUAN**

**PINDAH ALAMAT KANTOR UNIT GROGOL**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat, dengan ini kami informasikan bahwa :

BRI Unit Grogol yang semula berlokasi  
Jl. Dr. Muwardi IV No.41 RT.014/003, Kel. Grogol, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta

Terhitung sejak hari Senin, 10 Januari 2022 akan menempati alamat baru yang berlokasi  
Jl. Wuwardi II No.7C RT.001/002, Kel. Grogol, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta

Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk dan layanan BANK BRI  
Hubungi : **BANK BRI UNIT GROGOL di nomor 021-5663145**  
Contact BRI 14017 / 1500017 | www.bri.co.id |